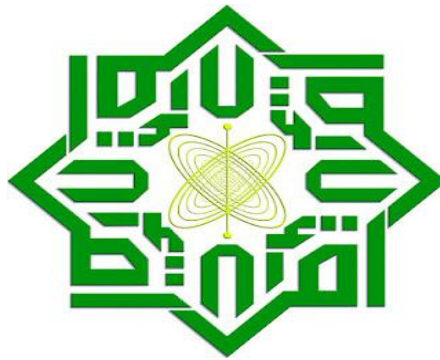


SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS
DALAM MELAPORKAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA DI KANTOR
PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP)
DURI**



OLEH :

**HARLYA MARNI
NIM. 108 7300 1746**

**JURUSAN AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
2012**

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS DALAM MELAPORKAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA DI KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) DURI

Oleh : Harlya Marni

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap pajak, kemauan membayar pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak dan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak mempengaruhi kesadaran membayar pajak. Penelitian dilakukan di KP2KP Duri. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda, selanjutnya data yang telah dikumpulkan tersebut diolah dengan menggunakan SPSS versi 16,00.

Data penelitian ini menggunakan kuisioner, dalam teknik pengumpulan data menggunakan skala likert, 5 point yang dimulai dari “sangat tidak setuju” (skala 1) sampai “sangat setuju” (skala 5). Sampel yang diambil adalah 100 responden wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar dan aktif melaporkan kewajiban perpajakannya di KP2KP Duri. Untuk menguji hipotesis menggunakan regresi linear berganda dengan taraf signifikansi 5%. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan, kemauan membayar pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak dan sikap optimis wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak pada KP2KP Duri.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan, kemauan membayar pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak dan sikap optimis wajib pajak berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: *pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, kemauan membayar pajak, manfaat pajak yang dirasakan WPOP, sikap optimis WPOP terhadap pajak, kesadaran membayar pajak.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji serta syukur di ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya yang tiada batas, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam melaporkan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Duri”. Shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat serta pengikutnya yang telah istiqomah dalam menjalankan syariatnya hingga akhir zaman.

Di sadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dari penulisan maupun pembahasan yang disajikan. Oleh sebab itu di harapkan kritik serta saran dari pembaca, agar dapat dicapai kesempurnaan dalam penulisan di masa yang akan datang. Selanjutnya dalam penyelesaian skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Pekanbaru.
3. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Pekanbaru.

4. Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak selaku Penasehat Akademis yang selalu memberikan nasehatnya untuk selalu giat dalam belajar.
5. Ibu Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu, untuk memberikan ide, saran serta nasehat agar selalu gigih dalam hal apapun termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu Dosen Pengajar yang selalu memberikan ilmu dan nasehatnya.
7. Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
8. Terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua, Ayahanda “Army Satria” dan ibunda “Khamsiar” serta kedua adik “Khatijah Army dan M.Azhari Satria”. Terima kasih untuk semua kasih sayang, cinta, doa, pengorbanan, motivasi dan dukungan materil yang telah diberikan.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan “Uny, Reni, Nopa, Ojan, Afri, Satria, dan Agunk” serta teman-teman di akuntansi lokal A, konsentrasi perpajakan, dan konsentrasi lainnya, serta buat teman-teman di kostan “kak kiki, ewuk, iyi, yoyo, yana”. Terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya, perjalanan selama tiga setengah tahun tidak akan dapat penulis lupakan.
10. Dan khusus buat seseorang yang sangat special yang bersedia memberikan semangat serta kesabarannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, buat “Alhafizh S.Pd” makasi buat semuanya sayang.

Pekanbaru, Juni 2012

Penulis

HARLYA MARNI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.Tujuan Penelitian	6
2.Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	8

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Kesadaran.....	10
B. Definisi Pajak.....	12
C. Fungsi Pajak.....	16
D. Jenis Pajak.....	17
E. Subjek Pajak.....	18
F. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak	20
G. Sistem Pemungutan Pajak.....	21
H. Definisi wajib pajak dan wajib pajak orang pribadi.....	22
I. Definisi Pekerjaan Bebas	22
J. Kewajiban Wajib Pajak.....	23
K. Kewajiban pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.....	28
L. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penelitian	29
M. Pajak menurut pandangan Islam	34
N. Hukum Pajak dan pemungutannya menurut Islam	35
O. Model Penelitian	35
P. Hipotesa.....	37

Q. Penelitian Terdahulu	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Populasi	42
D. Metode Pengambilan Sampel.....	43
E. Jenis Sumber Data.....	45
F. Instrument dan Metode Pengumpulan Data.....	45
G. Sumber Kuisisioner	46
H. Identifikasi Variabel.....	46
I. Pengukuran Variabel.....	48
J. Pengujian Validitas dan Reabilitas.....	49
K. Uji Normalitas	50
L. Uji Asumsi Klasik	51
M. Uji Hipotesis	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi dan Analisis Data.....	55
B. Analisis Data	61
C. Pembahasan.....	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Batas pembayaran pajak dan pelaporan SPT	25
Tabel II.2	Penelitian terdahulu	41
Tabel III.1	Uji Durbin-Watson (Uji DW)	51
Tabel IV.1	Tingkat pengumpulan kuesioner.....	55
Tabel IV.2	Profil responden berdasarkan jenis kelamin	56
Tabel IV.3	Profil responden berdasarkan usia	57
Tabel IV.4	Profil responden berdasarkan status	58
Tabel IV.5	Profil responden berdasarkan pendapatan pertahun	59
Tabel IV.6	Profil responden berdasarkan jenis pekerjaan	60
Tabel IV.7	Statistik Deskriptif	61
Tabel IV.8	Hasil Uji Validitas	63
Tabel IV.9	Hasil Uji Reliabilitas Data	65
Tabel IV.10	Hasil Uji Normalitas Data.....	67
Tabel IV.11	Nilai <i>Tolerance</i> dan VIF	68
Tabel IV.12	Hasil Uji Autokorelasi	69
Tabel IV.13	Hasil Regresi Linear Berganda	72
Tabel IV.14	Hasil Uji F Hitung	77
Tabel IV.15	Hasil Analisis Determinasi	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan Negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak lagi bisa diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Peranan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan Negara. Hal ini juga diiringi dengan meningkatnya APBN dari tahun ke tahun. Ini memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau menjaring wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak)

agar melaksanakan kewajiban perpajakan sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Memang harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataanya tidak suka membayar

pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi di lapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak

Sangatlah relevan bila menempatkan kesadaran dalam membayar pajak dari para wajib pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana, tetapi lebih dari itu, kita seharusnya juga memandang kesadaran dalam membayar pajak sebagai objek sorotan secara objektif bahkan mendekati kebenaran dalam mensukseskan program yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut. Perlakuan tersebut memang tidak berarti akan menempatkan wajib pajak dipihak yang lebih baik, tetapi harus diakui secara jujur bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak dikarenakan masih sangat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak.

Dikarenakan masih sangat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak. Kemudian ditambah lagi dengan sikap apatis masyarakat terhadap pajak, makin membuat usaha *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pajak semakin sulit untuk

dilaksanakan. Disamping itu, berhasil atau tidaknya pemerintah menghimpun dana dari sektor pajak tidak semata-mata tergantung pada aparat perpajakan saja tetapi justru tergantung pada kemauan, atau istilah perpajakannya kepatuhan dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Selain minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan juga sangat penting. Karena jika wajib pajak paham terhadap peraturan perpajakan maka otomatis wajib pajak tersebut akan patuh terhadap peraturan perpajakan. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan perpajakan dengan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada.

Selama ini banyak wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, dan telah memiliki NPWP belum mau melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak dengan baik. Kurangnya kemauan untuk memenuhi kewajiban tersebut antara lain disebabkan oleh asas perpajakan itu sendiri yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh pembayar pajak. Karena selama ini masyarakat belum melihat hasil yang signifikan dari penarikan pajak. Anggapan seperti inilah yang menyebabkan pada akhirnya menyebabkan berkurangnya kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Fery Dwi Prasetyo melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakannya di daerah Jogjakarta. Hasil dari penelitian Fery di dapat faktor

pengetahuan wajib pajak tentang pajak mempunyai pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Faktor pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan berpengaruh kuat terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Faktor manfaat yang dirasakan wajib pajak dari pajak mempunyai pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya, Faktor sikap optimis wajib pajak terhadap pajak mempunyai pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Hasil dari penelitian dan pengujian signifikansi yang dilakukan Fery Dwi Prasetyo diperoleh hasil bahwa ada dua pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak yaitu pengaruh negatif dan pengaruh positif. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan faktor yang dominan dan mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Faktor dominan lainnya yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak tentang pajak, tetapi pengetahuan wajib pajak tentang pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil judul
“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS
DALAM MELAPORKAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA DI KANTOR

PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) DURI”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam melaporkan kewajiban perpajakannya?
2. Apakah kemauan membayar pajak berpengaruh pada kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam melaporkan kewajiban perpajakannya?
3. Apakah manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam melaporkan kewajiban perpajakannya?
4. Apakah sikap optimis wajib pajak terhadap pajak berpengaruh pada kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam melaporkan kewajiban perpajakannya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.
- b. Untuk mengetahui apakah kemauan membayar pajak berpengaruh pada kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.
- c. Untuk mengetahui apakah manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.
- d. Untuk mengetahui apakah sikap optimis wajib pajak terhadap pajak berpengaruh pada kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan serta manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi wajib pajak orang pribadi terhadap perpajakan.

- b. Manfaat Bagi Akademis

Dalam penulisan ilmiah ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada mahasiswa, terlebih lagi dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

c. Manfaat Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh pengalaman baru, pengetahuan, serta pendalaman materi dalam pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

d. Manfaat Bagi Pembaca atau Masyarakat

Dalam penulisan ilmiah ini dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan ini nantinya akan dikembangkan menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini sebagai pendahuluan penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori yang melandasi pembahasan pada penelitian ini, yang berhubungan dengan judul penelitian, hipotesa, dan variabel penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membuktikan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Kesadaran

Kesadaran merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu tindakan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Menurut Feira (2002:125) “Kesadaran merupakan kemauan disertai dengan tindakan dari refleksi terhadap kenyataan”. Sedangkan menurut Padila dan Prior (2002:194) “Kesadaran merupakan suatu proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan diri yang mendorong dilakukannya suatu tindakan”.

Pada hakikatnya kesadaran membayar pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam keadaan tahu, mengerti dan tidak merasa dipaksa ataupun takut dalam melaksanakan kewajibannya, karena adanya nilai-nilai hukum dalam diri wajib pajak dan adanya pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor indogen atau intern yaitu faktor yang datang dari dalam diri manusia itu sendiri untuk menerima dan mengolah pengaruh yang datang dari luar menurut kemampuannya.

2. Faktor eksogen atau ekstren adalah faktor yang datang dari luar diri manusia dalam ini adalah faktor lingkungan.

Oleh karena itu maka sedikit banyaknya kesadaran seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga seseorang mempunyai kesadaran yang sesuai dengan pengaruh yang diterima di lingkungannya.

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran, terdapat juga tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran terbagi atas tiga, antara lain sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran tinggi

Tingkat kesadaran tinggi adalah suatu sikap atau tindakan seseorang yang oleh orang tersebut didasarkan pada keinsafan yang disertai suatu usaha yang maksimal untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam rangka mencapai tanpa ada pengaruh dari orang lain.

Dikaitkan dengan kesadaran membayar pajak terutangnya, maka yang dimaksud dengan kesadaran tinggi adalah keinsafan untuk membayar pajak terutang yang mendorong kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan bertanggung jawab atas terselenggaranya serta tercapai tujuan pembangunan nasional.

2. Tingkat kesadaran sedang

Tingkat kesadaran sedang adalah suatu sikap atau tindakan seseorang yang didasarkan oleh kesanggupan dari dirinya tanpa disertai suatu usaha yang maksimal dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini kesadaran membayar pajak terutang dengan kesadaran sedang adalah

adanya suatu keinsafan untuk membayar pajak karena dorongan dari pihak ketiga, sehingga usaha yang dilakukannya sebagai usaha yang tidak maksimal.

3. Tingkat kesadaran rendah

Dalam tingkat kesadaran rendah ini meskipun timbul keinsafan namun masih memperhatikan pengaruh dari orang lain dan sama sekali tanpa diikuti oleh usaha serta tanpa sarana bertanggung jawab atas tercapainya suatu tujuan.

B. Definisi Pajak

Sejak zaman dahulu sebelum perkembangan masyarakat seperti sekarang ini, telah dikenal adanya pemungutan pajak. Dimana dalam masyarakat yang sangat sederhana tersebut, penyelenggaraan kepentingan bersama diurus dan diatur oleh orang yang sangat dituakan dalam masyarakat disebut kepala kelompok/ suku/ marga. Dalam pembiayaan penyelenggaraan kepentingan bersama anggota kelompok memberikan sebagian waktu, tenaga dan sebagian harta miliknya kepada ketua kelompok. Pemberian dalam bentuk natura ini dapat dianggap sebagai pajak dalam bentuk yang sangat sederhana. Kemudian kelompok masyarakat tersebut semakin berkembang semakin besar yang diikuti pula dengan semakin berkembangnya kepentingan dari masyarakat. Sehingga peranan kepentingan bersama semakin kompleks dan memerlukan suatu organisasi besar yang dikenal dengan Negara saat ini. Pemberian dalam bentuk

natura tersebut kemudian berubah menjadi dalam bentuk uang karena dianggap lebih fleksibel dan berfungsi sebagai pembayaran pajak.

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum. Karena pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak juga didefinisikan sebagai iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak juga dikatakan sebagai suatu pengalihan sumber dari sector swasta ke sector pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa dapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan (2007:1) menyatakan: "Pajak ialah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang berlangsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof.Dr.Adriani:

“Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung”.

Pengertian pajak menurut Prof.Edwin R.A. Seligman dalam buku *Esssay in Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan: *Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.* Dari definisi tersebut terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang. Memeang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya untuk masyarakat.

Lima unsur definisi pajak:

1. Iuran/ pungutan
2. Pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tidak menerima kontra prestasi
5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Dari definisi diatas, terlihat ada beberapa hal pokok yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Pajak dipungut dari rakyat untuk membiayai program pemerintah.

2. Pajak dipungut secara paksa (*compulsory*), bukan secara sukarela (*voluntary*).
3. Tidak mendapatkan kontraprestasi, jadi rakyat yang membayar pajak tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Manfaat yang diterima masyarakat adalah berupa pelayanan yang diberikan pemerintah secara umum ataupun menikmati hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Karakteristik pokok dari pajak adalah: pemungutnya harus berdasarkan undang-undang. Diperlukan perumusan macam pajak dan berat ringannya tarif pajak itu, untuk itulah masyarakat ikut didalam menetapkan rumusannya.

Ketentuan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

1. Rp. 15.840.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi
2. Rp. 1.320.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin
3. Rp.15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:
 - a. Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang PPh pasal 21, dan
 - b. Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lain
4. Rp. 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semanda dalam garis keturunan lurus atau sederajat serta

anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

C. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur) dalam Siti Resmi (2007: 3), yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

D. Jenis Pajak

Dalam Siti Resmi (2007: 7), di Indonesia pajak dikelompokkan menurut beberapa kategori, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar

pajak, tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

E. Subjek Pajak

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi

Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Badan, terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:

a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau
- 2) Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak badan, yaitu

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

c. Subjek Pajak warisan, yaitu

Warisan yang belum dibagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:

a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang:

- 1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- 2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

F. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

G. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Siti Resmi (2007:11) dikemukakan beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu antara lain:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

H. Definisi Wajib Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Waluyo (2010:23) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan pengertian wajib pajak orang pribadi menurut Siti Resmi (2009:21) adalah orang pribadi yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

I. Definisi Pekerjaan Bebas

Menurut Rudy Suhartono (2010) dalam bukunya yang berjudul “Ensiklopedia Perpajakan Indonesia” pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Dalam buku Himpunan Undang-undang Perpajakan yang ditulis oleh Mohammad Zain (2010), pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

J. Kewajiban Wajib Pajak

Sesuai dengan sistem *self assessment*, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutanganya.

1. Pendaftaran

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah:

- a. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- b. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya;
- c. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;
- d. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi. Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi

dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui e-registration di website Direktorat Jendral Pajak. Selain mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha kena Pajak (PKP) dan kepadanya akan diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

2. Pembayaran dan Pelaporan

Setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan NPWP, Wajib Pajak mempunyai kewajiban menghitung dan membayar pajak, yang selanjutnya melaporkan pajak terutanganya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT masa dan SPT tahunan adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Batas Pembayaran Pajak dan Pelaporan SPT

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
Masa			
1	PPh Pasal 21/26	Tgl 10 bulan berikut setelah masa pajak berakhir	20 hari setelah masa pajak berakhir
2	PPh Pasal 25	Tgl 15 bulan berikut setelah masa pajak berakhir	20 setelah masa pajak berakhir
Tahunan			
1	PPh OP	Tgl 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak	Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
2	PBB	6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT	
3	BPHTB	Dilunasi pada saat terjadinya	

		perolehan hak atas tanah dan atau bangunan	
--	--	--------------------------------------------	--

Apabila dalam menghitung dan membayar pajak tersebut ditemukan ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya adat fisikal berdasarkan hasil pemeriksaan yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak, Direktorat Jendral Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada Wajib Pajak tersebut.

a. Hak Wajib Pajak

Wajib Pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan Direktorat Jendral Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Berkaitan dengan pembayaran pajak terutang, Wajib Pajak berhak memperoleh

- 1) Pengangsuran Pembayaran, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus.
- 2) Pengurangan PPH Pasal 25, apabila Wajib pajak mengalami kesulitan keuangan dikarenakan usahanya mengalami kesulitan sehingga tidak mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- 3) Pengurangan PBB, pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak.
- 4) Pembebasan Pajak, apabila Wajib Pajak mengalami musibah dikarenakan *force majeure* seperti bencana alam. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak akan mengeluarkan suatu kebijakan.

- 5) Pajak ditanggung Pemerintah, dalam rangka proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.
- 6) Insentif Perpajakan, untuk merangsang investasi.
- 7) Penundaan Pelaporan SPT Tahunan, apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/ menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 6 (enam) bulan.
- 8) Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila Wajib Pajak merasa bahwa jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.
- 9) Keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke Direktorat Jendral Pajak. Apabila dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak merasa kurang/ tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga.

10) Banding, apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

11) Peninjauan Kembali, apabila Wajib Pajak tidak/ belum puas dengan keputusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali.

Direktorat Jendral Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak, Syarat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pemberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Penyidikan Tindakan Pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

b. Nomor Pokok Wajib Pajak

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu,

kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut berfungsi sebagai:

- 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
- 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

K. Kewajiban Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, setelah terdaftar di kantor pelayanan pajak dan memperoleh NPWP maka akan memiliki kewajiban pajak yang harus dilaksanakan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas selaku pemberi kerja selain diwajibkan untuk membayar dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya sendiri juga diwajibkan untuk menyetorkan dan melaporkan PPh yang terutang atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang pada karyawannya.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas setelah memperoleh NPWP adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

Jenis SPT Masa yang harus disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas terdiri dari:

- a. SPT Masa PPh Pasal 25
- b. SPT Masa PPh Pasal 21/26
- c. SPT Masa PPN

- d. SPT Masa PPH Pasal 23/26
 - e. SPT Masa Final Pasal 4 (2)
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)
 - a. SPT Tahunan PPH Badan (SPT 1770)
 - b. SPT Tahunan PPh 21 (SPT 1721)

L. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Penelitian

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002:273). Berdasarkan pengertian diatas, hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melatarbelakangi wajib pajak pekerja bebas dalam melaporkan kewajiban perpajakannya adalah :

1. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak

Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap wajib pajak untuk tidak menjadi “wajib pajak yang baik”. Salah satu faktor yang berpengaruh tersebut dapat berasal dari faktor akademik, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak lewat pendidikan yang lebih tinggi “seharusnya” memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan yang dimiliki lebih baik dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih rendah. Temuan dari data hasil penelitian para wajib pajak oleh mantan Dirjen Pajak Machfud Sidik, yang termuat pada harian

Kompas Tanggal 15 September 2000 halaman 14, menyebutkan bahwa rendahnya kesadaran akan kewajiban membayar pajak terlihat di kalangan intelektual yang selama ini menjadi pengamat politik, ekonomi atau sosial serta tokoh lembaga swadaya masyarakat. Dalam penelitian Widayati (2010) terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pertama, kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan yang keenam

bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Pada Harian Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2001 menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan sangat kecil. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan juga dapat dilihat dalam bentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian dari Irianto (2005) dalam Vanesa dan Hari (2009) yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Widayati (2010) terdapat tiga unsur utama terkait dengan pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan

beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

2. Kemauan membayar pajak

Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007).

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dikembangkan suatu definisi untuk kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*). Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanesa dan Hari, 2009).

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006).

3. Manfaat pajak yang dirasakan Wajib Pajak

Manfaat pajak yang dirasakan Wajib Pajak adalah guna atau faedah atau baik dan buruknya pajak yang dapat diterima atau dirasakan oleh Wajib Pajak. Selama ini banyak wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, dan telah memiliki NPWP belum mau melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak dengan baik. Kurangnya kemauan untuk memenuhi kewajiban tersebut antara lain disebabkan oleh asas perpajakan itu sendiri yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dinikmati oleh pembayar pajak. Dalam jejak pendapat Kompas yang dimuat dalam harian Kompas tanggal 20 Mei 2001, hal 31, dinyatakan bahwa pajak yang ditarik oleh pemerintah selama ini belum dikembalikan kepada masyarakat. Selama ini masyarakat belum melihat hasil yang signifikan dari penarikan pajak. Anggapan seperti inilah yang pada akhirnya menyebabkan berkurangnya kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

4. Sikap Optimis Wajib Pajak terhadap Pajak

Sikap optimis Wajib Pajak terhadap pajak adalah pandangan yang mengandung harapan baik karena tidak khawatir akan rugi atau tidak untung dari Wajib Pajak terhadap pajak. Memang sudah jarang orang yang percaya bahwa penarikan pajak akan memberikan rasa adil antara si kaya dan si miskin. Sebab belum banyak program-program pemerintah yang bisa berjalan mulus membantu rakyat kecil, karena sering mengalami “kebocoran” saat dikurirkannya hasil pungutan pajak. Itulah

pendapat sebagian para wajib pajak yang merasa belum mendapatkan manfaat dari pembayaran pajak yang mereka lakukan selama ini. Orang tidak akan suka membayar pajak karena mereka tidak pernah mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkannya untuk membayar pajak. Hal ini yang sering menyebabkan wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kompas, 20 Mei 2001 menyatakan bahwa masalah pajak yang timbul tidak lepas dari keraguan para wajib pajak terhadap niat baik pemerintah dalam pengelolaan penyetoran pajak dan pengelolaan hasil pajak itu sendiri.

M. Pajak menurut pandangan Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau Al-Maks, atau biasa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan para pemungutnya disebut Shahibul Maks atau Al-Asysyar.

N. Hukum pajak dan pemungutannya menurut Islam

Dalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum sebagaimana firman Allah:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya :

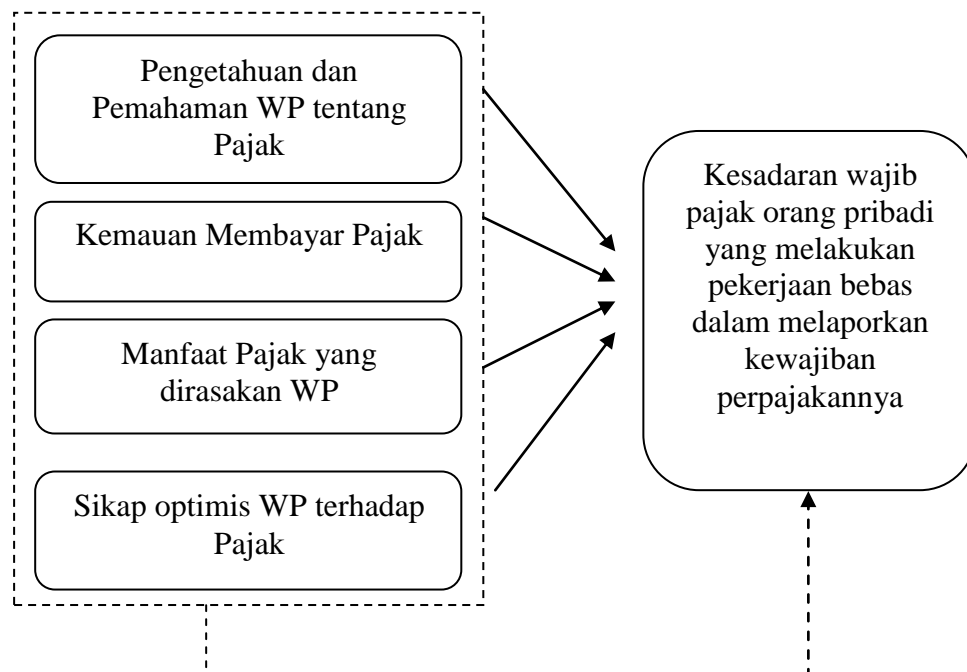
“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

O. Model Penelitian

Untuk menyatakan hubungan antar konsep dan menggambarkan hipotesa dalam penelitian ini, maka yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

Gambar II.1- Model Penelitian



Variabel Independen (X)

Variabel Dependen

(Y)

Keterangan : —→ Hubungan Parsial

- - - → Hubungan Simultan

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Sedangkan yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah:

1. Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang Pajak
2. Kemauan membayar pajak
3. Manfaat Pajak yang dirasakan Wajib Pajak
4. Sikap optimis Wajib Pajak terhadap Pajak

P. Hipotesa

Penelitian mengenai kesadaran para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya semakin menarik. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya Wajib Pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Di lain sisi kesadaran perpajakan merupakan suatu faktor penting untuk melaksanakan *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pajak, tetapi disamping itu banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk memaksimalkan kesadaran perpajakan bagi Wajib Pajak. Beberapa variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

- 1. Pengaruh Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak Tentang Pajak terhadap Kesadaran Perpajakan**

Berdasarkan penelitian Fery Dwi Prasetyo (2006), banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap wajib pajak untuk tidak menjadi “wajib pajak yang baik”. Salah satu faktor yang berpengaruh tersebut dapat berasal dari faktor akademik, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak lewat pendidikan yang lebih tinggi “seharusnya” memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan yang dimiliki lebih baik dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih rendah. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada, dalam penelitian Fery Dwi Prasetyo (2006).

H1: Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran perpajakannya.

2. Pengaruh kemauan membayar pajak terhadap Kesadaran Perpajakan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widayati (2010), kemauan membayar pajak merupakan faktor yang menginsiprasikan atau yang melatarbelakangi kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak terutang nya. Kemauan merupakan kerelaan seseorang untuk membayarkan, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Jika seorang wajib

pajak memiliki kemauan yang kuat dalam membayar pajak maka akan semakin tinggi tingkat kesadarannya dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

H2: Kemauan membayar pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran perpajakannya.

3. Pengaruh Persepsi Manfaat Pajak Terhadap Kesadaran Perpajakan

Pada penelitian Fery Dwi Prasetyo (2006), selama ini banyak wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, dan telah memiliki NPWP belum mau melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak dengan baik. Kurangnya kemauan untuk memenuhi kewajiban tersebut antara lain disebabkan oleh asas perpajakan itu sendiri yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dinikmati oleh pembayar pajak. Selama ini masyarakat belum melihat hasil yang signifikan dari penarikan pajak. Anggapan seperti inilah yang pada akhirnya menyebabkan berkurangnya kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

H3: Persepsi terhadap manfaat pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan.

4. Pengaruh Sikap Optimis Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Perpajakan

Memang sudah jarang orang yang percaya bahwa penarikan pajak akan memberikan rasa adil antara si kaya dan si miskin. Sebab belum banyak program-program pemerintah yang bisa berjalan mulus membantu rakyat kecil, karena sering mengalami “kebocoran” saat dikurirkannya hasil pungutan pajak. Itulah pendapat sebagian para wajib pajak yang merasa

belum mendapatkan manfaat dari pembayaran pajak yang mereka lakukan selama ini. Orang tidak akan suka membayar pajak karena mereka tidak pernah mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkannya untuk membayar pajak. Hal ini yang sering menyebabkan wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Masalah pajak yang timbul tidak lepas dari keraguan para wajib pajak terhadap niat baik pemerintah dalam pengelolaan penyetoran pajak dan pengelolaan hasil pajak itu sendiri, berdasarkan penelitian Fery Dwi Prasetyo (2006).

H4: Sikap Optimis Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran perpajakannya.

Berdasarkan empat dimensi dari Kesadaran Membayar Pajak tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. H1 : Terdapat pengaruh secara signifikan pengetahuan dan pemahaman WPOP pada peraturan perpajakan terhadap kesadaran WPOP dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.
2. H2 : Terdapat pengaruh secara signifikan kemauan membayar pajak WPOP pada peraturan perpajakan terhadap kesadaran WPOP dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.
3. H3 : Terdapat pengaruh secara signifikan persepsi terhadap manfaat pajak yang di rasakan WPOP pada kesadaran WPOP dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.
4. H4 : Terdapat pengaruh secara signifikan sikap optimis WPOP terhadap pajak pada kesadaran WPOP dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

5. H5 : Terdapat pengaruh secara signifikan pengetahuan dan pemahaman WPOP pada peraturan perpajakan, kemauan membayar pajak WPOP, persepsi terhadap manfaat pajak yang dirasakan WPOP dan sikap optimis WPOP terhadap kesadaran WPOP dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Q. Penelitian Terdahulu

Tabel II.2 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Signifikan	Tidak signifikan
Widayati, 2010	<i>Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Gambir</i>	- pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan	- kesadaran membayar pajak - persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan
Fery Dwi Prasetyo, 2006	<i>analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan di daerah jogjakarta</i>	- Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan - sikap optimis wajib pajak	- pengetahuan wajib pajak tentang pajak
Hengki Johanes, 2011	<i>faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan (pbb) di kecamatan brebes</i>	-Kesadaran Wajib Pajak -Pemahaman atau pengetahuan WP - tingkat pendidikan, - kemampuan aparat memotivasi	- sosial ekonomi

Edi Riyono, 2011	<i>pengaruh pendidikan dan pendapatan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa wonokeling kecamatan jatiyoso kabupaten karanganyar tahun 2011</i>	-Kesadaran Wajib Pajak - pendidikan - pendapatan	
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian ini dapat dikelompokkan menurut tujuan, metode, tingkat eksplanasi, analisis dan jenis data. Menurut metodenya, jenis penelitian ini adalah penelitian survey yang berupa penelitian penjelasan dan pengujian hipotesa. Dalam survey informasi yang dikumpulkam dari responden menggunakan kuisisioner yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi (Sugiono,2005)

Berdasarkan tingkat eksplanasi dan kedudukan variabel-variabelnya penelitian ini termasuk dalam kelompok penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah kuisisioner yang diberikan kepada responden berupa pertanyaan yang akan diberi nilai.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Duri, khususnya pada wajib pajak orang pribadi yang ada masih aktif dalam pembayaran pajak di KP2KP Duri.

C. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan karakteristik atau hasil pengukuran yang kita tetapkan dalam penelitian yang kita rancang.

Puraji Setyosari (2010:144) mengartikan populasi bisa diartikan sebagai sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang tercatat di KP2KP Duri dan statusnya masih aktif. Hingga Januari 2012 wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KP2KP Duri adalah sebanyak 18.578 orang.

D. Metode Pengambilan Sampel

Sampel merupakan sub kelompok atau sebagian dari populasi (Sekaran,2006). Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan harapan peneliti mendapatkan informasi dari kelompok sasaran spesifik. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*, artinya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel yang memenuhi kriteria tertentu. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif. Adapun kriteria sampel yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang berdomisili di kota Duri.
2. Wajib pajak yang terdaftar di KP2KP Duri.
3. Wajib pajak yang masih aktif melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya di KP2KP Duri.

Penentuan jumlah sampling yang di ambil menggunakan rumus slovin (Husein Umar, 2003 : 92) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Standar eror atau persen kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel dengan nilai $e = 10\%$, maka sampel yang diperlukan adalah:

$$\begin{aligned} n &= \frac{18.578}{1 + 18.578 (10\%)^2} \\ &= \frac{18.578}{186.78} \\ &= 100 \end{aligned}$$

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak sebagai responden penelitian. Responden yang disurvei dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas pada KP2KP Kota Duri dan dalam prosesnya menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajaknya (tidak diwakilkan pada orang lain). Berdasarkan rumus slovin di atas, di dapatkan jumlah sampel yang akan di teliti adalah sebanyak 100 orang.

E. Jenis Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer dimana data utama yang di pakai untuk menjawab masalah yang diteliti yaitu data mengenai wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar pada KP2KP Duri dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dimana data ini diperoleh langsung dari sumbernya langsung dan tidak melalui perantara apapun.
2. Data sekunder dimana data yang digunakan untuk menunjang peneliti yang terdiri dari data mengenai sikap, opini, pengalaman, ataupun profil wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Duri.

F. Instrumen dan Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner

Merupakan cara perolehan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi, tujuan pembuatan kuesioner ini untuk memperoleh data yang relevan dari responden.

2. Observasi

Meliputi penelitian dan pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk kemudian diperbandingkan dengan teori yang dikemukakan agar dapat dibuat suatu kesimpulan dan saran.

Kategori-kategori meliputi pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak, dan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak yang diukur dengan skala Sikap Likert agar didapatkan data penelitian menjadi skala interval. Metode ini adalah metode pengskalaan sikap dengan menggunakan distribusi responden sebagai dasar penentuan skala.

G. Sumber Kuisioner

Kuisioner yang menjadi acuan pada penelitian ini adalah kuisioner yang telah dilakukan pada penelitian Widayati : 2010, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Studi kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*).

H. Identifikasi Variabel

Ada beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel Dependen

Variabel Dependen yaitu variabel yang nilainya berubah apabila adanya perubahan dari variabel lainnya. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

2. Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel yang nilainya selalu berubah-ubah tanpa adanya pengaruh dari variabel-variabel lainnya. Adapun variabel

independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak dan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak.

1. Kesadaran membayar pajak.

Kesadaran masyarakat yang berhubungan dengan masalah pajak disini adalah berarti keadaan tahu atau mengerti tentang masalah perpajakan dalam hal ini menyangkut pemahaman terhadap konsep dan fungsi pajak serta keisyaratan untuk membayar pajak (Hengki Johanes:2011).

2. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak

Pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan pemahaman menyatakan sejauh mana tingkat pemahaman responden terhadap peraturan perpajakan, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.

3. Kemauan membayar pajak

Kemauan membayar pajak adalah dimana wajib pajak rela dalam membayar kewajiban perpajakannya tanpa mengharapkan imbalan sesuai dengan yang telah dibayarkannya.

4. Manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak

Menyatakan sejauh mana manfaat yang dirasakan responden setelah memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian Fery Dwi Prasetyo (2006), manfaat yang dirasakan wajib pajak adalah guna atau faedah yang baik maupun yang buruk yang dapat diterima atau dirasakan wajib pajak.

5. Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak

Menyatakan sejauh mana kepercayaan responden terhadap kinerja petugas perpajakan. Sikap optimis yang dirasakan wajib pajak adalah pandangan yang mengandung harapan baik karena tidak khawatir akan rugi atau tidak untung dari Wajib Pajak terhadap pajak.

I. Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan metode pengukuran dengan skala likert ataupun interval, dan dibuat dalam bentuk *checklist*. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2009). Adapun nilai kuantitatif yang dikomposisikan digunakan dengan menggunakan skala likert dan untuk suatu pilihan nilai (skor) dengan jarak interval. Skor dari pilihan tersebut antara lain, sangat setuju (SS) dengan 5 poin, setuju (S) dengan 4 poin, ragu-ragu (RR) dengan 3 poin, tidak setuju (TS) dengan 2 poin, sangat tidak setuju (STS) dengan 1 poin.

J. Pengujian Validitas dan Reabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.

Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner (Ghazali, 2001; 142).

Pengujian validitas dilakukan dengan mengkorelasikan setiap item-item pertanyaan dengan total nilai setiap variabel. Korelasi setiap item pertanyaan dengan nilai total setiap variabel dilakukan dengan teknik korelasi yaitu korelasi produk momen person (bivariate pearson) untuk mengetahui apakah variabel yang diuji valid atau tidak, hasil korelasi dibandingkan dengan angka kriteria r table korelasi dan taraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan diambil jika nilai hasil uji validitas lebih besar dari angka kriteria r table korelasi, maka item pertanyaan tersebut dikatakan valid. Untuk menentukan tingkat validitas peneliti menggunakan bantuan program *statistical product and service solution* (SPSS) versi 16,0.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2001:140).

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode one shot atau diukur sekali saja. Pengukuran yang dimaksud adalah pengukuran yang hanya

sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil pertanyaan lain. Untuk pengukuran reliabilitas, SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach alpa* (α) $> 60\%$. Hal ini diungkapkan oleh Nunally (1967) dalam Priyatno (2008).

K. Uji Normalitas

Pengujian normalitas adalah uji untuk melihat apakah distribusi residual mengikuti pola distribusi normal atau tidak, atau menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap normalitas untuk mengetahui metode statistik yang akan digunakan. Jika data berdistribusi normal maka uji statistik parametrik yang akan digunakan dan jika data berdistribusi tidak normal maka uji non parametrik yang akan digunakan.

Pengujian normalitas dapat digunakan dengan menggunakan one sample kolmogorov smirnov test dengan melihat signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini adalah melihat probability asymp. Sig (2-tailed), jika probabilitas asymp. Sig (2-tailed) $> 0,05$ maka data mempunyai distribusi normal dan sebaliknya jika $< 0,05$ maka data mempunyai distribusi yang tidak normal.

L. Uji Asumsi Klasik

Adapun Uji Asumsi Klasik diantara lain:

1. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. Menurut Santoso dalam Duwi (2009) pada umumnya jika *varians inflation factor* (VIF) dan *Tolerance*. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 atau nilai *tolerance* $< 0,10$ maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.

2. Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dengan mendeteksi besaran Durbin-Watson. Menurut Ghozali (2006) Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan Uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel III.1 Uji Durbin-Watson (Uji DW)

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi negatif atau positif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

3. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Duwi Priyatno,2009). Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat scatterplots. Jika membentuk pola tertentu, maka terdapat heteroskedastisitas (Ghozali,2001).

M. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel yang diteliti, maka teknik pengujian hipotesa yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda (*multiple regression linear*) yaitu hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Adapun rumus regresi linear berganda dengan bentuk interaksi keseluruhan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan : Y = Kesadaran membayar pajak, b_1, b_2, b_3, b_4 , dst,

X = Koefisien regresi, X_1 = Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak, X_2 = Kemauan membayar pajak, X_3 = Manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak, X_4 = Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak a = Konstan, dan e = Standar error

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji F dan uji t dalam pengujian hipotesis yaitu :

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Uji F sering disebut dengan uji koefisien regresi secara serentak. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali : 2006)

2. Uji Parsial (Uji t)

Setelah diketahui adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, selanjutnya semua variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan pengujian lebih lanjut dengan menggunakan statistik uji t.

Pengujian tersebut dilakukan dengan dua arah (2 tailed) dengan tingkat keyakinan 95% dan dilakukan uji tingkat signifikan pengaruh hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Tingkat signifikannya ditentukan sebesar 5% dan *degree of freedom* (df) = n-k-1

Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak, dengan kata lain bahwa variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap variabel dependen. Demikian juga sebaliknya, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) adalah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase itu menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.

Pengolahan data penelitian ini menggunakan *multiple regression* dengan bantuan program komputer SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 16.0.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Duri. Kuesioner disebarkan dengan cara mengantar langsung kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Duri. Setelah kuesioner selesai diisi oleh responden, peneliti mengambil kembali untuk selanjutnya ditabulasikan dan diolah dengan menggunakan *statistical package for social science* (SPSS) versi 16,0. Penyebaran kuesioner dimulai tanggal 23 April 2012 dan tanggal pengumpulan 10 Mei 2012.

Jumlah kuesioner yang diedarkan kepada responden sebanyak 100 kuesioner. Kuesioner yang dapat dikumpulkan atau kembali yaitu sebanyak 100 kuesioner, semua kuesioner yang terkumpul dapat memenuhi syarat untuk diolah yaitu 100 kuesioner. Tingkat pengumpulan kuesioner dapat dilihat pada tabel IV.1.

Tabel IV.1 - Tingkat Pengumpulan kuesioner

KETERANGAN	TOTAL
Total Kuesioner Yang di Sebarkan	100
Total Kuesioner yang Terkumpul Kembali	100
Total Kuesioner yang Dapat Diolah	100
Persentase Pengembalian Koesioner (100/100 x 100%)	100 %

Sumber: Pengolahan data hasil penelitian

Berdasarkan tabel IV.1 dapat dijelaskan bahwa peneliti menyebarkan 100 kuesioner. Kuesioner yang terkumpul kembali sebanyak 100 kuesioner atau 100%. Jadi, total kuesioner yang dapat diolah dari jumlah keseluruhan kuesioner yang disebarkan adalah 100 kuesioner atau 100%.

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Data mengenai karakteristik responden adalah sebagai berikut:

1. Profil responden berdasarkan jenis kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat di tabel IV.2 berikut ini:

Tabel IV.2
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	56	56%
Perempuan	44	44%
Jumlah	100	100%

Berdasarkan tabel IV.2 dapat diketahui bahwa Wajib pajak yang terdaftar di KP2KP Duri yang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. Data yang dipilih melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang jenis kelamin pria sebesar 56%, dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 44%, jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah Laki-laki. Hal ini

disebabkan responden laki-laki lebih banyak jumlahnya pada saat pembagian kuesioner di KP2KP Duri.

2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel IV.3 berikut ini:

Tabel IV.3
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase
25-35 tahun	12	12%
36-45 tahun	59	59%
46-55 tahun	23	23%
Diatas 56 tahun	6	6%
Jumlah	100	100%

Berdasarkan tabel IV.3 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 25-35 tahun berjumlah 12 orang atau sebesar 12%, 36-45 tahun berjumlah 59 orang atau 59%, 46-55 tahun berjumlah 23 orang atau 23% dan yang berusia diatas 56 tahun berjumlah 6 orang atau sebesar 6%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia antar 36-45 tahun. Hal ini disebabkan karena responden yang berusia antara 36-45 tahun lebih banyak yang melakukan pelaporan pada saat penyebaran kuesioner di KP2KP Duri.

3. Profil Responden Berdasarkan Status

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan status dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut ini:

Tabel IV.4
Profil Responden Berdasarkan Status

Status	Jumlah Responden	Persentase
Belum Menikah	19	19%
Menikah	81	81%
Jumlah	100	100%

Berdasarkan tabel IV.4 dapat diketahui bahwa responden yang belum menikah berjumlah 19 orang atau sebesar 19% dan yang menikah berjumlah 81 orang atau 81%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berstatus menikah. Hal ini disebabkan karena responden yang berstatus menikah lebih banyak melakukan pelaporan pada saat penyebaran kuesioner di KP2KP Duri.

4. Profil Responden Berdasarkan Pendapatan Tahunan

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendapatan tahunan dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut ini:

Tabel IV.5
Profil Responden Berdasarkan Pendapatan Tahun

Pendapatan Tahun	Jumlah Responden	Persentase
10-15 juta	11	11%
16-20 juta	4	4%
21-30 juta	16	16%
Di atas 31 juta	69	69%
Jumlah	100	100%

Berdasarkan tabel IV.5 dapat diketahui bahwa responden yang berpenghasilan antara 10-15 juta berjumlah 11 orang atau sebesar 11%, 16-20 juta berjumlah 4 orang atau sebesar 4%, 21-30 juta berjumlah 16 orang atau sebesar 16% dan diatas 31 juta berjumlah 69 orang atau sebesar 69%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berpenghasilan diatas 31 juta. Hal ini disebabkan karena responden berpenghasilan diatas 31 juta lebih banyak yang melakukan pelaporan pada saat penyebaran kuesioner pada KP2KP Duri.

5. Profil Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel IV.6 berikut ini:

Tabel IV.6
Profil Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase
Perdagangan	73	73%
Jasa	27	27%
Jumlah	100	100%

Berdasarkan tabel IV.6 dapat diketahui bahwa responden yang bekerja dalam bidang perdagangan berjumlah 73 orang atau sebesar 73% dan yang bekerja dalam bidang jasa berjumlah 27 orang atau sebesar 27%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini bekerja dalam bidang perdagangan. Hal ini disebabkan karena responden yang bekerja di bidang perdagangan lebih banyak melakukan pelaporan pada saat penyebaran kuesioner di KP2KP Duri.

Analisa data dilakukan terhadap 100 sampel responden yang telah memenuhi kriteria untuk dapat diolah lebih lanjut. Hasil pengolahan data statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel IV.7 dibawah ini :

Tabel IV.7 - Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran membayar pajak	100	16	40	26.99	6.139
Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan	100	13	45	29.38	6.754
Kemauan Membayar Pajak	100	7	25	15.55	4.951
Manfaat yang dirasakan wajib pajak	100	4	10	6.72	2.571
Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak	100	5	15	9.41	2.678
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan tabel IV.7 terlihat bahwa nilai jawaban semua responden terhadap kesadaran membayar pajak mempunyai nilai minimum sebesar 16, nilai maksimum sebesar 40, dan nilai rata-rata sebesar 26,99, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 29,38, kemauan membayar pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 15,55, manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 6,72, dan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 9,41.

B. Analisis data

1. Uji Validitas Data

Dalam pengujian yang peneliti lakukan untuk mengetahui kualitas data, layak atau tidaknya suatu data untuk diangkat, maka peneliti menganalisis data dengan

cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pernyataan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap. Dan dalam uji validitas yang peneliti lakukan, penulis menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson) dan dilakukan dengan *one shot method*, yaitu metode yang dilakukan sekali pengukuran saja. Kuesioner dapat dikatakan valid jika nilai *Pearson Korelation* lebih besar dari nilai *r* tabel untuk 100 responden dengan signifikansi 0,05 yaitu $df=(n-2)= 98$ yaitu sebesar 0,197. Untuk variabel independen dan dependen, dari hasil uji validitas dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel. IV.8 - Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Person Correlation	Keterangan
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pajak	X1.1	0,428	Valid
	X1.2	0,472	Valid
	X1.3	0,684	Valid
	X1.4	0,518	Valid
	X1.5	0,574	Valid
	X1.6	0,537	Valid
	X1.7	0,704	Valid
	X1.8	0,522	Valid
	X1.9	0,584	Valid
Kemauan Membayar Pajak	X2.1	0,598	Valid
	X2.2	0,772	Valid
	X2.3	0,776	Valid
	X2.4	0,767	Valid
	X2.5	0,755	Valid
Manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak	X3.1	0,896	Valid
	X3.2	0,883	Valid
Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak	X4.1	0,766	Valid
	X4.2	0,794	Valid
	X4.3	0,589	Valid
Kesadaran membayar pajak	Y.1	0,526	Valid
	Y.2	0,515	Valid
	Y.3	0,679	Valid
	Y.4	0,593	Valid
	Y.5	0,534	Valid
	Y.6	0,566	Valid
	Y.7	0,551	Valid
	Y.8	0,538	Valid

Dari tabel IV.8 dapat dijelaskan bahwa yang mempengaruhi kesadaran membayar pajak diukur dengan 27 item pertanyaan yang terdiri dari :

- a. Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak diukur dengan 9 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,428, artinya semua item pertanyaan diatas 0,197 dan memenuhi syarat untuk valid.
- b. Kemauan membayar pajak diukur dengan 5 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,598, artinya semua item pertanyaan diatas 0,197 dan memenuhi syarat untuk valid.
- c. Manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak diukur dengan 2 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,883, artinya semua item pertanyaan diatas 0,197 dan memenuhi syarat untuk valid.
- d. Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak dengan 3 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,589, artinya semua item pertanyaan diatas 0,197 dan memenuhi syarat untuk valid.
- e. Kesadaran membayar pajak diukur dengan 8 item pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,515, artinya semua item pertanyaan diatas 0,197 dan memenuhi syarat untuk valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha* menggunakan SPSS.

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0.60 . Hasil uji reliabilitas data dapat dilihat pada tabel IV.9 dibawah ini :

Tabel IV.9 - Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Hasil Reliability (Alpha)		Keterangan
	Kriteria	Cronbach's alpha	
Variabel Indevenden:			
1. Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak (X1)	0.60	0,725	Reliabel
2. Kemauan membayar pajak (X2)	0.60	0,782	Reliabel
3. Manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak (X3)	0,60	0,736	Reliabel
4. Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak (X4)	0,60	0,633	Reliabel
5. Variabel Dependent: Kesadaran membayar pajak (Y)	0,60	0,689	Reliabel

Sumber : Data olahan 2012

Hasil pengujian reliabilitas yang disajikan pada tabel IV.9 menunjukkan tidak ada koefisien *cronbach alpha* yang kurang dari 0,60. Sehingga instrument tersebut reliabel untuk digunakan.

3. Uji Normalitas

Pengujian normalitas adalah uji untuk melihat apakah distribusi residual mengikuti pola distribusi normal atau tidak, atau menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap normalitas untuk mengetahui metode statistik yang akan digunakan.

Pengujian normalitas dapat digunakan dengan menggunakan *one sample kolmogorov smirnov test* dengan melihat signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini adalah melihat *probability asymp. Sig (2-tailed)*, jika *probabilitas asymp. Sig (2-tailed)* > 0,05 maka data mempunyai distribusi normal dan sebaliknya jika < 0,05 maka data mempunyai distribusi yang tidak normal.

Uji normalitas data dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.10 – Hasil Uji Normalitas Data

Variabel	Nilai K-S-Z	Sig. (2-tailed)	Kriteria	Kesimpulan
Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak	1.471	.076	0,05	Normal
Kemauan membayar pajak	1.677	.749	0,05	Normal
Manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak	1.238	.193	0,05	Normal
Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak	2.350	.090	0,05	Normal
Kesadaran membayar pajak	2.307	.087	0,05	Normal

Sumber : Data Olahan

Tabel IV.10 menunjukkan nilai K-S-Z untuk pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, adalah sebesar 1,471 dengan signifikansi sebesar 0,076. Nilai K-S-Z untuk kemauan membayar pajak, adalah sebesar 1,677 dengan signifikansi sebesar 0,749. Nilai K-S-Z untuk manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak, adalah sebesar 1,238 dengan signifikansi sebesar 0,193. Nilai K-S-Z untuk sikap optimis wajib pajak terhadap pajak adalah sebesar 2,350 dengan signifikansi sebesar 0,090. Nilai K-S-Z untuk kesadaran membayar pajak adalah sebesar 2,307 dengan signifikansi sebesar 0,087.

Apabila nilai signifikansi masing-masing variabel dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$, maka nilai signifikansi K-S-Z tersebut diatas $\alpha = 0,05$, oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, kemauan membayar pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak, sikap optimis wajib pajak terhadap pajak, dan kesadaran membayar pajak secara

statistik telah terdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati besaran *varians inflation factor* (VIF) dan *Tolerance*. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 atau nilai *tolerance* $< 0,10$ maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Besaran VIF dan *tolerance* pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel IV.11 - Nilai *Tolerance* dan VIF

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak	0,626	1,598	Bebas Multikol
Kemauan membayar pajak	0,720	1,389	Bebas Multikol
Manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak	0,787	1,271	Bebas Multikol
Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak	0,916	1,092	Bebas Multikol

Sumber : Data olahan 2012

Dari tabel IV.11 menunjukkan variabel pengetahuan dan pemahaman tentang pajak mempunyai nilai Tolerance sebesar 0,626 sedangkan nilai VIF 1,598, variabel kemauan membayar pajak mempunyai nilai Tolerance sebesar 0,720 sedangkan nilai VIF 1,389, variabel manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak mempunyai nilai Tolerance sebesar 0,787 sedangkan nilai VIF 1,271, dan variabel sikap optimis wajib pajak terhadap pajak mempunyai nilai Tolerance sebesar 0,916 sedangkan nilai VIF 1,092..Dari semua variabel independen tidak ada nilai VIF diatas 10. Berarti tidak terdapat gangguan multikolinearitas pada penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dan layak digunakan.

b. Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dengan mendeteksi besaran Durbin-Watson. Menurut Ghazali (2006) prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi.

Tabel IV.12 - Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.382 ^a	.146	.110	5.793	2.166

a. Predictors: (Constant), Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak, Manfaat yang dirasakan wajib pajak, Kemauan Membayar Pajak, Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan

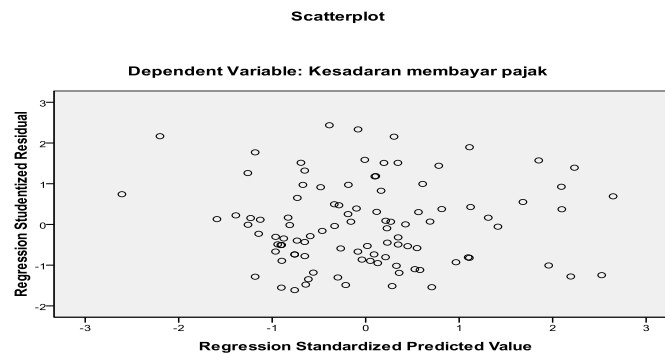
b. Dependent Variabel: Kesadaran membayar pajak

Pada tabel tersebut dapat dilihat nilai statistik Durbin-Watson sebesar 2.166. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5 %, jumlah sampel 100 (n) dan jumlah variabel independen 4 (k=4), maka nilai di tabel Durbin-Watson (d_u) sebesar 1,758. Oleh karena $d_u < d < 4 - d_u$ atau $1,758 < 2,166 < 2,242$. Hal ini membuktikan bahwa model analisis memenuhi syarat bebas autokorelasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot yaitu dengan melihat ada tidaknya pola yang terdapat pada grafik scatterplot.

Gambar IV.1 Scatterplot Heteroskedastisitas



Dari gambar IV.1 dapat dilihat bahwa terjadi penyebaran titik dan tidak membentuk suatu pola. Hal ini dapat diindikasikan bahwa model tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.

5. Uji Hipotesis

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa untuk menguji hipotesis – hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS versi 16.0, dimana metode ini menganalisis variabel independen secara keseluruhan tanpa memilih variabel yang nantinya dijadikan satu kelompok dalam persamaan regresinya atau semua variabel dimasukkan untuk mencari pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen melalui meregresikan kesadaran membayar pajak sebagai variabel dependen terhadap pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, kemauan membayar pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak dan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak sebagai variabel independen. Hasil hipotesis seperti yang tercantum dalam tabel IV.13 di bawah ini:

Tabel IV.13 - Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	15.357	3.068		5.006	.000		
Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan	.231	.109	.254	2.117	.037	.626	1.598
Kemauan Membayar Pajak	-.031	.139	-.025	4.222	.039	.720	1.389
Manfaat yang dirasakan wajib pajak	.070	.255	.029	3.274	.043	.787	1.271
Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak	.517	.227	.226	2.276	.025	.916	1.092

a. Dependent Variabel: Kesadaran membayar pajak

Persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y \text{ (Kesadaran membayar pajak)} = 15,357 + 0,231X_1 - 0,031X_2 + 0,070X_3 + 0,517X_4 + e$$

- Konstanta sebesar 15,357 menyatakan, bahwa jika variabel independen tetap maka variabel dependen adalah sebesar 15,357.
- Harga koefisien $b_1 = 0,231$ berarti bahwa apabila pengetahuan dan pemahaman tentang pajak mengalami kenaikan 1 poin sedangkan variabel

independen lainnya dianggap tetap, maka variabel dependen (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,231.

- c. Harga koefisien $b_2 = -0,031$ berarti bahwa apabila kemauan membayar pajak mengalami kenaikan 1 poin sedangkan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel dependen (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,031.
- d. Harga koefisien $b_3 = 0,070$ berarti bahwa apabila manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak mengalami kenaikan 1 poin sedangkan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel dependen (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,070.
- e. harga koefisien $b_4 = 0,517$ berarti bahwa apabila sikap optimis wajib pajak terhadap pajak mengalami kenaikan 1 poin sedangkan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel dependen (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,517.

6. Hasil Uji Secara Parsial Uji (t)

H_1 : Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

Hasil regresi menunjukkan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, yaitu : $t_{hitung} 2,117 > t_{tabel}$ sebesar 1,985 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,037 berada di bawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

Berdasarkan penelitian Fery Dwi Prasetyo (2006), banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap wajib pajak untuk tidak menjadi “wajib pajak yang baik”. Salah satu faktor yang berpengaruh tersebut dapat berasal dari faktor akademik, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak lewat pendidikan yang lebih tinggi “seharusnya” memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan yang dimiliki lebih baik dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih rendah. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada, dalam penelitian Fery Dwi Prasetyo (2006).

H₂ : Kemauan membayar pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

Hasil regresi menunjukkan kemauan membayar pajak, yaitu : $t_{hitung} 4,222 > t_{tabel}$ sebesar 1,985 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,039 berada di bawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widayati (2010), kemauan membayar pajak merupakan faktor yang menginsiprasikan atau yang melatarbelakangi kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak terutang nya. Kemauan merupakan kerelaan seseorang untuk membayarkan, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Jika seorang wajib pajak memiliki kemauan yang kuat dalam membayar pajak maka akan semakin tinggi tingkat kesadarannya dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

H₃ : Manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

Hasil regresi menunjukkan manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak, yaitu : $t_{hitung} 3,247 > t_{tabel}$ sebesar 1,985 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,043 berada di bawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

Pada penelitian Fery Dwi Prasetyo (2006), selama ini banyak wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, dan telah memiliki NPWP belum mau melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak dengan baik. Kurangnya kemauan untuk memenuhi kewajiban tersebut antara lain disebabkan oleh asas perpajakan itu sendiri yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dinikmati oleh pembayar pajak. Selama ini masyarakat belum melihat hasil yang signifikan dari penarikan pajak. Anggapan seperti inilah yang pada

akhirnya menyebabkan berkurangnya kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

H4 : Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

Hasil regresi menunjukkan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak, yaitu : $t_{hitung} 2,276 > t_{tabel}$ sebesar 1,985 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,025 berada di bawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa sikap optimis wajib pajak terhadap pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

Memang sudah jarang orang yang percaya bahwa penarikan pajak akan memberikan rasa adil antara si kaya dan si miskin. Sebab belum banyak program-program pemerintah yang bisa berjalan mulus membantu rakyat kecil, karena sering mengalami “kebocoran” saat dikucurkannya hasil pungutan pajak. Itulah pendapat sebagian para wajib pajak yang merasa belum mendapatkan manfaat dari pembayaran pajak yang mereka lakukan selama ini. Orang tidak akan suka membayar pajak karena mereka tidak pernah mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkannya untuk membayar pajak. Hal ini yang sering menyebabkan wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Masalah pajak yang timbul tidak lepas dari keraguan para wajib pajak terhadap niat baik pemerintah dalam pengelolaan penyetoran pajak dan pengelolaan hasil pajak itu sendiri, berdasarkan penelitian Fery Dwi Prasetyo (2006).

7. Hasil Uji Secara Simultan Uji (F)

Berdasarkan uji SPSS diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel IV.14 - Hasil Uji F Hitung

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	543.307	4	135.827	4.048	.004 ^a
	Residual	3187.683	95	33.555		
	Total	3730.990	99			

a. Predictors: (Constant), Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak, Manfaat yang dirasakan wajib pajak, Kemauan Membayar Pajak, Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan

b. Dependent Variabel: Kesadaran membayar pajak

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 4,048 > F Tabel 2,468 dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,004 berada dibawah 0,05. Maka model regresi menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, kemauan membayar pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak, dan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

8. Koefisien Determinasi

Tabel IV.15 – Hasil Analisis Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.882 ^a	.746	.710	1.293

- a. Predictors: (Constant), Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak, Manfaat yang dirasakan wajib pajak, Kemauan Membayar Pajak, Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan
- b. Dependent Variabel: Kesadaran membayar pajak

Nilai *R Square* pada penelitian ini adalah 0.746 atau 74,6%. hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, kemauan membayar pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak, dan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak) terhadap variabel dependen (kesadaran membayar pajak) sebesar 74,6% atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, kemauan membayar pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak, dan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak) mampu menjelaskan sebesar 74,6% variasi variabel dependen (kesadaran membayar pajak) sedangkan sisanya sebesar 25,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

Banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap wajib pajak untuk tidak menjadi “wajib pajak yang baik”. Salah satu faktor yang berpengaruh tersebut dapat berasal dari faktor akademik, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak lewat pendidikan yang lebih tinggi

“seharusnya” memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan yang dimiliki lebih baik dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih rendah. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada.

Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, yaitu : $t_{hitung} 2,117 > t_{tabel}$ sebesar 1,985 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,037 berada di bawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

2. Kemauan membayar pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

Kemauan membayar pajak merupakan faktor yang menginsiprasikan atau yang melatarbelakangi kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak terutang nya. Kemauan merupakan kerelaan seseorang untuk membayarkan, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Jika seorang wajib pajak memiliki kemauan yang kuat dalam membayar pajak maka akan semakin tinggi tingkat kesadarannya dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan kemauan membayar pajak, yaitu : $t_{hitung} 4,222 > t_{tabel}$ sebesar 1,985 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,039 berada di bawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

3. Manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

Selama ini banyak wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, dan telah memiliki NPWP belum mau melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak dengan baik. Kurangnya kemauan untuk memenuhi kewajiban tersebut antara lain disebabkan oleh asas perpajakan itu sendiri yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dinikmati oleh pembayar pajak. Selama ini masyarakat belum melihat hasil yang signifikan dari penarikan pajak. Anggapan seperti inilah yang pada akhirnya menyebabkan berkurangnya kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak, yaitu : $t_{hitung} 3,247 > t_{tabel}$ sebesar 1,985 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,043 berada di bawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

4. Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

Memang sudah jarang orang yang percaya bahwa penarikan pajak akan memberikan rasa adil antara si kaya dan si miskin. Sebab belum banyak program-program pemerintah yang bisa berjalan mulus membantu rakyat kecil, karena sering mengalami “kebocoran” saat dikucurkannya hasil pungutan pajak. Itulah pendapat sebagian para wajib pajak yang merasa belum mendapatkan manfaat dari pembayaran pajak yang mereka lakukan selama ini. Orang tidak akan suka membayar pajak karena mereka tidak pernah mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkannya untuk membayar pajak. Hal ini yang sering menyebabkan wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Masalah pajak yang timbul tidak lepas dari keraguan para wajib pajak terhadap niat baik pemerintah dalam pengelolaan penyetoran pajak dan pengelolaan hasil pajak itu sendiri.

Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak, yaitu : $t_{hitung} 2,276 > t_{tabel}$ sebesar 1,985 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,025 berada di bawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa sikap optimis wajib pajak terhadap pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan yang secara ringkas disajikan sebagai berikut ;

1. Secara Simultan (Uji F), nilai F hitung sebesar $4,048 > F \text{ Tabel } 2,468$ dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,004 berada dibawah 0,05. Maka model regresi menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, kemauan membayar pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak, dan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.
2. Berdasarkan hasil uji secara parsial bahwa hasil regresi menunjukkan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, yaitu : $t_{\text{hitung}} 2,117 > t_{\text{tabel}}$ sebesar 1,985 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,037 berada di bawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.
3. Berdasarkan hasil uji secara parsial bahwa hasil regresi menunjukkan kemauan membayar pajak, yaitu : $t_{\text{hitung}} 4,222 > t_{\text{tabel}}$ sebesar 1,985 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,039 berada di bawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

4. Berdasarkan hasil uji secara parsial bahwa hasil regresi menunjukkan manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak, yaitu : $t_{hitung} 3,247 > t_{tabel}$ sebesar 1,985 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,043 berada di bawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.
5. Berdasarkan hasil uji secara parsial bahwa hasil regresi menunjukkan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak, yaitu : $t_{hitung} 2,276 > t_{tabel}$ sebesar 1,985 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,025 berada di bawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa sikap optimis wajib pajak terhadap pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.
6. Nilai *R Square* pada penelitian ini adalah 0.746 atau 74,6%. hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, kemauan membayar pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak, dan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak) terhadap variabel dependen (kesadaran membayar pajak) sebesar 74,6% atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, kemauan membayar pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak, dan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak) mampu menjelaskan sebesar 74,6% variasi variabel dependen (kesadaran membayar pajak) sedangkan sisanya sebesar 25,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk para wajib pajak diharapkan senantiasa meningkatkan kesadaran dalam membayar kewajiban perpajakannya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa penghasilan Negara terbesar berasal dari pajak. Karena pajak merupakan sumber pembangunan bangsa.
2. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya dapat mempertimbangkan untuk penambahan variabel lainnya selain pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, kemauan membayar pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak terhadap pajak dan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak. Agar dapat diketahui seberapa besar pengaruhnya terhadap kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Surat At-Taubah ayat 49

Diana Anastasia, S. A. (2009). *Perpajakan Indonesia, Konsep, Aplikasi, dan Praktis*. Yogyakarta: Andi.

Fery Dwi Prasetyo. (2006). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Jogjakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Imam, Ghazali 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi 3, Semarang: Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Imam, Ghazali 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi IV, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Kamus Umum Bahasa Indonesia. 200. 1013. Jakarta.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: Andi Offset

Prasetyono, D. S. (2011). *Panduan Lengkap Tata Cara dan Perhitungan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Laksana.

Priyatno, Dwi, 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Yogyakarta: Penerbit MediaKom,

Resmi, S. (2009). *Perpajakan : Teori dan Kasus* (5 ed.). (E. S. Suharsi, Penyunt.) Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.

Rochmat Soemitro, S. (2007). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*.

Rudy Suhartono. (2010). *Ensiklopedia Perpajakan*. Jakarta : Salemba empat

Sekaran, U. *Research Methods For Business*. Jakarta: Salemba Empat.

Mohammad Zain dan Suryo Hermana. (2010). *Himpunan undang-undang perpajakan 2010*. Jakarta: PT. Indeks.

Sugiono. (2003). *Metode Penelitian Bisnis* (Vol. 4 Agustus). (T. Rencana, Penyunt.) Bandung: JF Alfa Beta.

Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi. 2009. *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar*, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Umar, Husein. (2003). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Tesis dan Bisnis*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widayati. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Gambir*. Jakarta.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan>

<http://globalindomanagemen.wordpress.com/2008/09/07/pengertian-wajib-pajak-orang-pribadi/>

<http://kedanta.tripod.com/karya.html>

<http://maksumpriangga.com/pengertian-dasar-dan-ciri-ciri-pajak-definisi-pajak.html>

<http://duniabaca.com/definisi-pajak-menurut-para-ahli.html>

www.pajak.go.id.

<http://junaardas.blogspot.com/2011/01/pengertian-sampel-dalam-penelitian.html>